

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi. 2018. Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*. Vol. 1. Pp.1-16.
- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2018. "Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective". *Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI)*, Vol.19, No.1, p.1-11.
- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2017. "Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah: Semu atau Nyata". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol.21, No.2, p.105-117.
- Ahyaruddin, M., and R. Akbar. 2016. "The Relationship between the Use of a Performance Measurement System, Organizational Factors, Accountability, and the Performance of Public Sector Organizations". *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, Vol.31, No.1, p.1-22.
- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin. 2012. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*. *Pacific Accounting Review*, Vol 24 ISS:3 pp. 262-291
- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, and Brian Perrin. 2015. *Implementing Performance Measurement System: Indonesian local government under pressure*". *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol 12 Iss:1 pp.-
- Baskoro, F.R., and R. Akbar. 2018. "Mengevaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Instansi Publik: Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah". *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (JATI)*, Vol.1 No.2, p.52-63.
- Braun, V., Clarke, V. 2006. Using Thematic Analysis In Psychology. *Journal Psychology*. (online). [http:// Journal Psychology. Qualitative Research In Psychology.co.id.3 \(2\). 77-101](http://JournalPsychology.QualitativeResearchInPsychology.co.id.3(2).77-101). Diakses pada tanggal 25 Februari 2019
- Cavalluzzo, K.S., Ittner, C.D., 2004. "Implementing performance measurement innovations: evidence from government", *Acoounting, Organizations and Society* 29(3-4)
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Thousand Oaks, California, USA: SAGE Publication.
- Dacin, T., J, Goodstein, and W. R. Scoott. 2002. *Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to The Special Research Forum*. *Academy of Management Journal* 45: 45-46.



- DiMaggio, Paul J, and Walter W Powell.1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphisme and Collective Rationality in Organizational Fields*. American Sociological Review 48: 147-160
- Friedman, Mark. 2005. *Trying Hard is Not Good Enough*. 1<sup>St</sup> Edition. Washington: FPSI Publishing.
- Hennink, M., Inge Hutter and Ajay Bailey. 2011. *Qualitative Research Methods*. 1<sup>St</sup> Edition. London: SAGE Publishing.
- Knowlton, Lisa W., and Cynthia C. Phillips. 2013. *The Logic Model Guide Book*. 2<sup>Nd</sup> Edition. California: SAGE Publications Inc.
- Lee, J., Fisher, G., 2007. The perceived usefulness and use of performance information in the Australian public sector', *Accounting, Accountability and Performance* 13(1).
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Ketiga). Yogyakarta : Penerbit STIM YKPN
- Mahsun, Mahmud. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Edisi Pertama). Yogyakarta : Penerbit BPF
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Lembaga Adrnistrasi Negara.
- Longo, Paul J. 2002. "The Performance Blueprint, an Integrated Logic Model Developed to Enhance Performance Measurement Literacy: The Case of Performance-Based Contract Management". *2002 Annual Conference of the American Evaluation Association*. November 6-10, 2002.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Republik Indonesia.1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporam Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sugiyono 2010. Metode riset kualitatif. Alfabeta. Bandung
- Sofyani, H., Rusdi Akbar and R.D. Ferrer. 2018. “20 Years of Performance Measurement System (PMS) Implementation in Indonesian Local Governments: Why is Their Performance Still Poor?”. *Asian Journal of Business and Accounting (AJBA)*, Vol.11, No.1, p.151-183.
- Sofyani, H., and R. Akbar. 2015. “Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Isomorfisma Institutional”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol.19, No.2, p.153-173.
- Sofyani, H., and R. Akbar. 2013. “Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia (JAKI)*, Vol.10, No.2, p.184-205.
- Wang, X., 2002, ‘Assessing administrativeaccountability’, *American Review of Public Administration*32 (3).